

ANALISIS KEBUTUHAN APARATUR PEMERINTAH JABATAN FUNGSIONAL DI INSPEKTORAT KOTA SINGKAWANG

Khatizah

Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

E-mail : khati_zavirgo@yahoo.com

Abstrak

Penulisan Skripsi ini dimaksudkan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan belum efektifnya jumlah aparatur pemerintah Jabatan Fungsional di Inspektorat Kota Singkawang. Judul skripsi ini diangkat berdasarkan permasalahan ketersediaan jumlah aparatur pemerintah Jabatan Fungsional yang belum efektif berdasarkan beban kerja dalam pencapaian sejumlah target obyek pemeriksaan. Penelitian ini menggunakan model eksploratif dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan empat langkah penelitian, yaitu melakukan penelitian pendahuluan (presurvey), pembuatan rencana penelitian (Usulan Penelitian), Pengambilan data-data sekunder dan data-data primer yang kemudian dilakukan analisis pada hari itu juga setelah pengambilan data di lapangan (wawancara atau observasi), dan membuat laporan penelitian (Skripsi). Lokasi penelitian di Kota Singkawang. Subjek Penelitian adalah Pemerintah Kota Singkawang yang terkait dengan analisis kebutuhan aparatur pemerintah Jabatan Fungsional, Inspektorat Kota Singkawang, dan aparatur pemerintah Jabatan Fungsional. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah belum efektifnya jumlah aparatur pemerintah Jabatan Fungsional karena tidak seimbang antara beban kerja yang diberikan kepada jumlah aparatur pemerintah Jabatan Fungsional dengan waktu kerja yang digunakan oleh aparatur. Untuk itu rekomendasi kebijakan adalah mempertimbangkan kebijakan dalam hal penugasan pemeriksaan oleh aparatur, menyegerakan pembuatan Analisis Beban Kerja Jabatan Fungsional, dan menyusun kebutuhan aparatur untuk dapat diajukan dalam formasi penerimaan aparatur pemerintah Jabatan Fungsional.

Kata Kunci : Analisis Kebutuhan, Aparatur Pemerintah Jabatan Fungsional, Efektif.

Abstract

Thesis writing is intended to determine the factors that led to the ineffectiveness of the number the Functional Government Apparatus at Inspectorate Singkawang. The title of of this thesis concerns raised by the availability of the number the Functional Government Apparatus who have not been effective based on workload the achievement of targets in the inspection object. This research uses a model of the kind of exploratory qualitative descriptive research. The research was carried out by four research steps, namely a preliminary investigation (presurvey), making research plan (Proposed Research), secondary data collection and primary data which is then analyzed on the same day after data collection in the field (interviews or observation), and a research report (Thesis). Research sites in Singkawang. The research subject is Singkawang Government needs analysis related to Analysis of Functional Government Apparatus Need, Inspectorate Singkawang, Functional Government Apparatus. The conclusion of this research is the ineffectiveness of the Functional Government Apparatus amount as the imbalance between workload given

Khatizah

Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Untan

Page 477

to the number of Functional Government Apparatus with working time used by the apparatus. For the policy recommendation is to consider the policy in terms of the assignment inspection by officials, hasten creation of Functional Workload Analysis, and arrange the apparatus need to be filed in the formation of the Functional Government Apparatus acceptance.

Keywords : Analysis of Need, Functional Government Apparatus, Effective.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Suatu organisasi khususnya organisasi raksasa seperti negara, birokrasi mutlak diperlukan agar aturan main yang telah disepakati antara yang diperintah (rakyat) dan yang memerintah (pemerintah), dapat melaksanakannya guna mencapai tujuan negara. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa birokrasi adalah “roh” suatu organisasi dimana birokrat terlibat aktif didalamnya. Birokrat yang lebih dikenal oleh masyarakat luas sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang selanjutnya disebut dengan aparatur negara dan atau aparatur pemerintah merupakan unsur penting dalam penyelenggaraan urusan-urusan pemerintahan demi tercapainya tujuan dari organisasi pemerintah.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien, aparatur pemerintah dituntut untuk bekerja secara profesional. Namun pada kenyataannya, profesionalisme yang diharapkan belum sepenuhnya terwujud. Penyebab utamanya adalah karena terjadi ketidaksesuaian antara kompetensi aparatur dengan jabatan yang didudukinya dan ketidaksesuaian antara jumlah aparatur dengan jumlah beban kerja yang diberikan. Ketidaksesuaian tersebut disebabkan oleh komposisi keahlian atau keterampilan aparatur yang belum

proporsional. Demikian pula pendistribusian Pegawai Negeri Sipil saat ini masih belum mengacu pada kebutuhan organisasi yang sebenarnya, dalam arti belum didasarkan pada beban kerja yang ada.

Seorang aparatur pemerintah adalah seseorang yang duduk dalam suatu jabatan, dibutuhkan karena adanya beban kerja organisasi dan ditempatkan, dikembangkan untuk melakukan tugas sebagaimana yang uraian tugas jabatan dan didayagunakan untuk memperoleh hasil kerja sebagaimana yang ditargetkan oleh jabatan tersebut. Oleh karena itu, perencanaan formasi harus didasarkan pada hasil perhitungan beban kerja organisasi sehingga formasi aparatur yang telah disusun dapat memenuhi kebutuhan organisasi untuk pelaksanaan tugas organisasi dalam mendukung pencapaian visi dan misinya. Peningkatan kualitas perencanaan pegawai, khususnya penyusunan formasi yang rasional dilaksanakan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien.

Pengukuran beban kerja diperlukan untuk menganalisis waktu efektif yang diperlukan dalam menyelesaikan satu produk pekerjaan. Pengukuran beban kerja juga dapat digunakan untuk menghitung jumlah kebutuhan sumber daya manusia berdasarkan standar waktu kerja efektif per tahun. Dan dengan diterapkannya

Khatizah

analisis jabatan di instansi pemerintah, maka dapat diketahui sejumlah beban kerja yang efektif bagi aparatur pemerintah. Analisis jabatan dan beban kerja yang telah dihasilkan tersebut kemudian dipergunakan untuk menganalisis kebutuhan sumber daya manusia dalam suatu instansi pemerintah.

Berbicara masalah lembaga pengawasan di daerah maka tidak terlepas dari Inspektorat Kota Singkawang yang kemudian diatur dengan Peraturan Walikota Singkawang Nomor 21 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kota Singkawang. Pengawasan dilakukan dengan pemeriksaan terhadap kelembagaan, pegawai daerah, keuangan daerah, barang daerah dan urusan pemerintahan. Kualitas hasil pengawasan atau pemeriksaan di Inspektorat Kota Singkawang merupakan salah satu ketentuan keberhasilan Good Governance.

Dalam pencapaian hasil pengawasan dan pemeriksaan yang berkualitas harus didasarkan pada formasi ideal dan rekrutmen sumber daya manusia. Tidak berbeda dengan institusi pemerintah lainnya, jabatan aparatur pemerintah di lingkungan Inspektorat Kota Singkawang terdiri dari dua macam, yaitu Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari jabatan fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) dan Jabatan Fungsional Auditor.

Kelompok jabatan fungsional adalah jabatan yang mempunyai tugas, pokok dan fungsi berdasarkan kemampuan dan keterampilan khusus dibidangnya, dalam hal

ini adalah untuk memeriksa obyek pemeriksaan pada kelembagaan, pegawai daerah, keuangan daerah, barang daerah dan urusan pemerintahan. Jabatan Fungsional merupakan asset aparatur pemerintah yang harus dikelola dengan baik. Usaha yang efektif dan efisien mengandung arti bahwa output yang dihasilkan oleh aparatur pemerintah jabatan fungsional memenuhi apa yang ditargetkan oleh organisasi.

Dari presurvey yang telah dilakukan, diperoleh pernyataan dari Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan adalah sebagai berikut: Untuk melakukan pemeriksaan dengan jumlah aparatur pemerintah Jabatan Fungsional saat ini, seringkali jabatan fungsional kekurangan orang untuk turun ke lapangan sehingga dilakukan penambahan orang yang diambil dari staf Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang sebenarnya tidak mempunyai kewenangan seperti halnya tugas Jabatan Fungsional sebagai pemeriksa.

Berdasarkan pernyataan diatas, maka dapat diberikan kesimpulan sementara bahwa Jabatan Fungsional saat ini dinilai masih kurang dengan jumlah yang ada. Sehingga sangat diperlukan suatu analisis yang dilakukan untuk mengetahui dan menghitung jumlah kebutuhan aparatur pemerintah Jabatan Fungsional. Sehingga hasil akhirnya nanti dapat dipenuhi agar pelaksanaan pemeriksaan oleh aparatur pemerintah Jabatan Fungsional di Inspektorat Kota Singkawang dapat berjalan dengan efektif.

Dari hasil pengamatan dalam presurvey yang telah dilakukan, analisis jabatan di

Inspektorat Kota Singkawang sudah dilaksanakan dengan baik dan dapat dilihat dari uraian jabatan yang telah diketahui oleh setiap aparatur untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya. Namun yang terjadi, obyek pemeriksaan setiap tahunnya tidak dapat sepenuhnya diaudit dan penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tidak tepat pada waktunya.

Keberadaan aparatur pemerintah jabatan fungsional diperlukan untuk Inspektorat Kota Singkawang agar target kualitas, target kuantitas dan target waktu penyelesaian pekerjaan dapat mencapai tujuan secara jelas, terukur, dan rasional. Masalah yang ada ialah obyek pemeriksaan yang telah dibebankan kepada aparatur pemerintah jabatan fungsional yang ada belum semua bisa diselesaikan secara cepat dan tepat pada tahun tersebut sehingga target penyelesaian sulit dicapai meskipun target tersebut dipastikan harus selesai dan kemudian harus disambung penyelesaiannya pada tahun selanjutnya.

2. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, peneliti merumuskan permasalahan, yaitu mengapa jumlah aparatur pemerintah Jabatan Fungsional Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) di Inspektorat Kota Singkawang belum sesuai dengan yang seharusnya berdasarkan pengukuran beban kerja di Inspektorat Kota Singkawang ?

3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-

faktor yang menyebabkan belum sesuaiya jumlah aparatur pemerintah Jabatan Fungsional Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) berdasarkan beban kerja dalam pencapaian target audit obyek pemeriksaan di Inspektorat Kota Singkawang.

4. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya fokus ilmu pengetahuan dan pengembangan ilmu tentang analisis kebutuhan aparatur pemerintah jabatan fungsional dengan menggunakan teori yang relevan serta menjadi acuan bagi penulis selanjutnya khususnya penelitian tentang kebutuhan paratur pemerintah.

b. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi instansi pemerintah, yaitu agar terpenuhinya jumlah aparatur pemerintah Jabatan Fungsional Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) Inspektorat Kota Singkawang yang efektif, serta menjadi acuan atau pedoman dalam penyusunan formasi aparatur pemerintah Jabatan Fungsional di Inspektorat Kota Singkawang.

B. KERANGKA TEORI DAN METODOLOGI

1. Kerangka Teori

Perencanaan sumber daya manusia memastikan bahwa organisasi mengetahui dan mendapat orang yang dibutuhkannya untuk menjalankan kegiatan usaha sekarang dan

Khatizah

masa datang. Perencanaan ini dimulai dari sasaran strategis perusahaan dan analisis sumber daya manusia yang diperlukan untuk mencapainya. Perencanaan sumber daya manusia mengatur persyaratan kuantitatif atau jumlah orang dan kualitatif atau jenis orang (Armstrong, 1994:121).

Siagian (2011:41) menyatakan bahwa yang menjadi fokus perhatian pada perencanaan sumber daya manusia adalah langkah-langkah tertentu yang diambil oleh manajemen guna lebih menjamin bahwa bagi organisasi tersedia tenaga kerja yang tepat untuk menduduki berbagai kedudukan, jabatan dan pekerjaan yang tepat pada waktu yang tepat, kesemuanya dalam rangka pencapaian tujuan dan berbagai sasaran yang telah dan akan ditetapkan.

Menurut Cushwai (1996) yang mengutip dari Institut Personalia dan Pengembangan (dalam Tohardi, 2002:163) bahwa definisi dari Perencanaan Sumber Daya Manusia (Human Resource Planning) adalah "Proses yang sistematis dan terus menerus dalam menganalisis kebutuhan-kebutuhan organisasi akan Sumber Daya Manusia dalam kondisi yang selalu berubah, dan mengembangkan kebijakan personalia yang sesuai dengan rencana jangka panjang organisasi".

Dalam membuat perencanaan Sumber Daya Manusia yang baik ada 4 hal yang harus diperhatikan untuk membentuk sistem. Tohardi (2002:165) menyebutkan bahwa:

- a. Jumlah Sumber Daya Manusia
- b. Peramalan kebutuhan Sumber Daya Manusia yang akan datang

- a. Adanya perubahan posisi Sumber Daya Manusia yang ada sekarang di dalam organisasi yang dikarenakan oleh adanya kematian, pensiun, promosi, PHK dan mengundurkan diri.
- b. Evaluasi secara kontinyu terhadap peforman Sumber Daya Manusia yang ada.

Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang dalam hal ini berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur Kota Singkawang. Inspektorat Kota Singkawang adalah instansi pemerintah yang didalamnya juga terdapat jabatan fungsional, yaitu Jabatan Fungsional Auditor dan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Daerah (2UPD).

Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil Pasal 1 disebutkan bahwa Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

Dalam Peraturan di Indonesia, Jabatan Fungsional Auditor diatur di dalam PER/220/M.PAN/7/2008 Tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya

Pasal 1 ditegaskan bahwa: Auditor adalah Jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang di dalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.

Selanjutnya di dalam PER/15/M.PAN/9/2009 Tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (JFP2UPD) Pasal 1 dipaparkan bahwa: Jabatan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah, di luar pengawasan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.

Untuk dapat menyusun formasi yang tepat, maka yang disusun terlebih dahulu ialah "analisis kebutuhan pegawai". Menurut Miftah Thoha (2008:29-30) Analisis kebutuhan pegawai adalah "suatu proses menganalisis secara logis dan teratur untuk dapat mengetahui jumlah dan kualitas pegawai yang diperlukan oleh suatu unit organisasi agar mampu melaksanakan tugasnya serta berdaya guna, berhasil guna, dan berkelanjutan".

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:

KEP/75/M.PAN/7/2004 Tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja Dalam Rangka Penyusunan Formasi Pegawai Negeri Sipil, Analisis Kebutuhan Pegawai adalah "proses yang dilakukan secara logis, teratur, dan berkesinambungan untuk mengetahui jumlah dan kualitas pegawai yang diperlukan. Analisis kebutuhan pegawai dilakukan agar pegawai memiliki pekerjaan yang jelas sehingga pegawai secara nyata terlihat sumbangan tenaganya terhadap pencapaian misi organisasi atau program yang telah ditetapkan".

Berdasarkan KEP/75/M.PAN/7/2004 Tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja Dalam Rangka Penyusunan Formasi Pegawai Negeri Sipil, dalam menghitung formasi pegawai terdapat 3 (tiga) aspek pokok yang harus diperhatikan. Ketiga aspek tersebut adalah:

1. Beban kerja

Beban kerja merupakan aspek pokok yang menjadi dasar untuk perhitungan. Beban kerja perlu ditetapkan melalui program-program unit kerja yang selanjutnya dijabarkan menjadi target pekerjaan untuk setiap jabatan.

2. Standar Kemampuan Rata-rata

Standar kemampuan rata-rata dapat berupa standar kemampuan yang diukur dari satuan waktu yang digunakan atau satuan hasil. Standar kemampuan dari satuan waktu disebut dengan Norma Waktu. Sedangkan standar kemampuan dari satuan hasil disebut dengan Norma Hasil.

3. Waktu kerja

Khatizah

Waktu kerja yang dimaksud di sini adalah waktu kerja efektif, artinya waktu kerja yang secara efektif digunakan untuk bekerja. Waktu kerja Efektif terdiri atas Hari Kerja Efektif dan Jam Kerja Efektif.

Analisis Beban Kerja adalah suatu teknik manajemen yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh informasi mengenai tingkat efisiensi dan efektivitas kerja organisasi berdasarkan volume kerja. Beban kerja tersebut diperoleh dari hasil kali antara volume kerja dan norma waktu. Volume kerja adalah sekumpulan tugas atau pekerjaan yang harus/dapat diselesaikan dalam waktu satu tahun. Norma waktu adalah waktu yang wajar dan nyata-nyata dipergunakan secara efektif dengan kondisi normal oleh seorang pemangku jabatan untuk menyelesaikan suatu tahapan proses penyelesaian pekerjaan. Efektivitas dan efisiensi kerja adalah perbandingan antara bobot/beban kerja dan jam kerja efektif dalam rangka penyelesaian tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan dari analisis kebutuhan pegawai adalah sebagai salah satu usaha agar setiap pegawai yang ada pada setiap organisasi mempunyai pekerjaan tertentu, jangan sampai ada yang tidak mempunyai pekerjaan. Salah satu alat untuk menganalisis kebutuhan Pegawai Negeri Sipil adalah adanya uraian jabatan (job description) yang tersusun rapi. Dengan adanya uraian jabatan, maka dapatlah diketahui jenis jabatan, ruang lingkup tugas yang dapat dilaksanakan, sifat pekerjaan, syarat-syarat pejabat, dan dapat pula diketahui perkiraan kapasitas pegawai dalam jangka

waktu tertentu. Mangkunegara (2011:11) menjelaskan bahwa “Analisis kebutuhan tenaga kerja merupakan suatu proses analisis yang logis dan teratur untuk memenuhi jumlah dan kualitas pegawai yang diperlukan dalam suatu unit organisasi. Tujuannya agar setiap pegawai pada semua unit organisasi mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan tugas dan wewenang tanggung jawabnya”.

Persoalan yang dihadapi oleh manajer sumber daya manusia bukan hanya menentukan jumlah sumber daya manusia yang dibutuhkan oleh organisasi, tetapi yang tidak kalah sulitnya adalah bagaimana menempatkan sumber daya manusia pada bidang pekerjaan yang sesuai dengan keahlian, keterampilan, kecakapan agar efisien dan efektif bagi organisasi. Menurut Zainun (1994) (dalam Tohardi, 2002:162) menyatakan bahwa “Formasi riil sebagai suatu rencana kebutuhan akan sumber daya manusia untuk jangka waktu tertentu seharusnya disusun berdasarkan kriteria obyektif, seperti: jenis pekerjaan, sifat pekerjaan, perkiraan beban kerja dan perkiraan kapasitas kerjasama orang, prinsip pelaksanaan pekerjaan, jenjang dan jumlah pangkat dari jabatan yang tersedia dalam satuan organisasi yang bersangkutan, peralatan yang tersedia dan kemampuan keuangan organisasi”.

2. Metode Penelitian

Untuk menjawab permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini digunakan penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan model eksploratif. Penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan model eksploratif adalah jenis penelitian yang

digunakan untuk menggambarkan obyek secara alamiah, utuh dan kompleks. Secara keseluruhan, yang telah peneliti lakukan adalah mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan belum efektifnya jumlah aparatur pemerintah Jabatan Fungsional Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) di Inspektorat Kota Singkawang.

Penelitian ini dilaksanakan di Inspektorat Kota Singkawang dimulai dari bulan Maret Tahun 2013 sampai dengan bulan Juni Tahun 2013. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini antara lain : Kepala Inspektorat Kota Singkawang, Sekretaris Inspektorat Kota Singkawang, Inspektur Pembantu Inspektorat Kota Singkawang, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Inspektorat Kota Singkawang, satu orang Auditor Inspektorat Kota Singkawang, dan dua orang Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) Inspektorat Kota Singkawang. Objek penelitian yang diteliti adalah faktor-faktor yang menyebabkan belum efektifnya jumlah aparatur pemerintah Jabatan Fungsional Auditor dan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) di Inspektorat Kota Singkawang.

Adapun instrumen sebagai alat bantu yang digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman observasi, pedoman wawancara, dokumen-dokumen, alat perekam suara, dan kamera. Kemudian kegiatan pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui Teknik

Observasi, Teknik Wawancara, dan Studi Dokumen.

Selanjutnya teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan teknik Analisis Taksonomi (Taxonomic Analysis). Sementara itu, dalam analisis data dalam penelitian ini juga menggunakan teknik analisis dengan tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

Adapun untuk melakukan pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi. Teknik triangulasi yang diaplikasikan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber. Triangulasi sumber digunakan untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh dari beberapa informan, kemudian data tersebut di cek kembali kepada informan yang lain. Teknik keabsahan data yang selanjutnya digunakan adalah saturasi data, dimana dilakukan proses pengumpulan data kembali sampai adanya suatu ketetapan yang menunjukkan tidak berubahnya informasi dan data yang dikumpulkan.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Kebutuhan Aparatur Pemerintah Jabatan Fungsional di Inspektorat Kota Singkawang.
 - a. Beban kerja yang ada tidak sesuai dengan jumlah aparatur pemerintah Jabatan Fungsional sehingga untuk melaksanakan sejumlah obyek pemeriksaan harus ditambahkan dengan aparatur pemerintah non fungsional agar penyelesaian

sejumlah obyek pemeriksaan tepat waktu. Untuk itu, belum sesuainya jumlah aparatur pemerintah Jabatan Fungsional dikarenakan jumlah beban kerja yang tidak seimbang dengan jumlah aparatur pemerintah Jabatan Fungsional yang ada di Inspektorat Kota Singkawang.

- b. Standar kemampuan rata-rata yang dimiliki aparatur pemerintah Jabatan Fungsional dalam memeriksa sejumlah obyek pemeriksaan sudah dapat dikatakan baik. Namun karena tidak sesuainya beban kerja yang ada menyebabkan perlunya peningkatan kualitas aparatur itu sendiri ataupun dengan penambahan jumlah aparatur pemerintah Jabatan Fungsional.
- c. Waktu Kerja yang digunakan oleh aparatur pemerintah Jabatan Fungsional dirasakan sangat kurang, karena tidak sesuai dengan besarnya beban kerja yang diberikan. Dengan jumlah waktu kerja yang dipadatkan dan jumlah aparatur yang terbatas, sehingga beban kerja terasa sangat berat. Waktu kerja yang tidak sesuai dengan beban kerja dan jumlah aparatur yang tersedia menyebabkan belum efektifnya jumlah aparatur. Sehingga waktu kerja yang diberikan tidak cukup untuk menyelesaikan sejumlah obyek pemeriksaan.
- d. Perbandingan antara beban kerja dan jumlah aparatur pemerintah Jabatan Fungsional saat ini dapat dinyatakan tidak sesuai. Hal ini dapat dibuktikan dengan dilakukannya penambahan aparatur dari non fungsional dalam penugasan

pemeriksaan. Sehingga apabila dilakukan penambahan jumlah aparatur pemerintah Jabatan Fungsional, baik Auditor maupun P2UPD, maka beban kerja yang diberikan akan berkurang, sehingga kerjasama aparatur semakin banyak karena jumlah yang memeriksa lebih banyak dalam penugasan pemeriksaan.

- e. Pengelolaan keuangan organisasi yang dilaksanakan di Inspektorat Kota Singkawang tetap berpedoman kepada kebijakan pemerintah daerah dimana untuk Inspektorat Kota Singkawang, dana pengawasan tidak dianggarkan pada tahun 2013. Akan tetapi pelaksanaan fungsi pembinaan dan pengawasan oleh Inspektorat Kota Singkawang tetap dijalankan sebagaimana mestinya. Namun untuk pengelolaan keuangan di internal Inspektorat Kota Singkawang, bukanlah menjadi suatu hal yang dapat menyebabkan terjadinya kebutuhan pegawai di Inspektorat Kota Singkawang, akan tetapi karena pihak Inspektorat Kota Singkawang hanya dapat mengajukan kebutuhan itu apabila adanya formasi untuk kebutuhan jumlah aparatur pemerintah Jabatan Fungsional.

2. Keterbatasan Studi

Selama melakukan penelitian dengan judul Analisis Kebutuhan Aparatur Pemerintah Jabatan Fungsional di Inspektorat Kota Singkawang, peneliti mengalami beberapa kendala dan menjadi keterbatasan dalam penelitian ini. Adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah peneliti merasa bahwa

dalam penelitian ini masih sangat sulitnya menggali informasi yang lebih dalam yang berkaitan untuk tiap-tiap indikator dalam hal faktor-faktor yang menyebabkan masih belum sesuai jumlah aparatur pemerintah Jabatan Fungsional dalam penyelesaian sejumlah obyek pemeriksaan. Untuk itu, akan sangat diperlukan penyempurnaan oleh peneliti-peneliti lain.

3. Apresiasi

Pada kesempatan ini, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran aparatur pemerintah di lingkungan I Inspektorat Kota Singkawang yang telah mengizinkan peneliti untuk melakukan penelitian di tempat tersebut dan kemudian telah banyak memberikan bantuan kepada peneliti sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Armstrong, Michael. 1994. *Peri Pedoman Manajemen: Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Elex Media Komputindo.
- Makmur, Syarif. 2008. *Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Efektivitas Organisasi*. Jakarta : RajaGrafindo Persada.
- Mangkunegara, Anwar Prabu. 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Moekijat. 1978. *Analisa Jabatan Job Analysis*. Bandung : Alumni.
- , 1985. *Manajemen Kepegawaian*. Bandung : Alumni.
- Moleong, J. Lexy. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Siagian, Sondang P. 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Situmorang, M. Victor., Jusuf Juhir. 1994. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Sugiyono. 2010. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.
- , 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- , 2011. *Metodologi Penelitian Administrasi*. Bandung : Alfabeta.
- Toha, Miftah. 2008. *Manajemen Kepegawaian Sipil di Indonesia*. Jakarta : Kencana.
- Tohardi, Ahmad. 2002. *Pemahaman Praktis Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung : CV. Ma dar Maju.
- , 2010. *Diktat Kuliah Metodologi Penelitian Sosial*. Pontianak : FISIP Universitas Tanjungpura.
- , 2013. *Pedoman Penulisan Skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama FISIP UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat*. Pontianak : Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama FISIP UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Peraturan Perundang-undangan:

- Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 75 Tahun 2004 Tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja Dalam Rangka Penyusunan Formasi Pegawai Negeri Sipil
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah

Khatizah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Daerah

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009 Tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD)

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 220 Tahun 2008 Tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil

Skripsi:

Aki, Acun. 2003. *Analisis Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Pada Kantor Bupati Landak Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Tesis. Program Magister Ilmu Sosial Universitas Tanjungpura Pontianak. Pontianak.

Novera, Windry. 2010. *Analisis Beban Kerja dan Kebutuhan Karyawan Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (Studi Kasus Unit Tata Usaha Departemen Pada Institut Pertanian Bogor)*. Skripsi. Departemen Manajemen Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor. Bogor. Diunduh pada Tanggal 10 Januari 2013.

Khatizah



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA

Jalan A Yani Pontianak, Kotak Pos 78124
Homepage : <http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id>
Email : jurnalmhs@fisip.untan.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA**

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : KHATIZAH
NIM / Periode lulus : E42009088/ 2013
Fakultas / Jurusan : FISIP / ILMU ADMINISTRASI
Email address/HP : khati_zavirgo@yahoo.com/085252664447

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan memenuhi syarat administrasi kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalti-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**ANALISIS KEBUTUHAN APARATUR PEMERINTAH JABATAN FUNGSIONAL
DI INSPEKTORAT KOTA SINGKAWANG**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain :

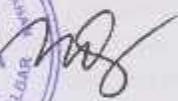
- fulltext
 content artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

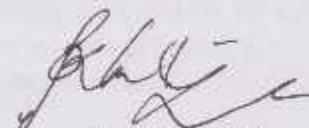
Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak pengelola jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/disetujui
Pengelola Jurnal

Prodi IP 3/14
2

H. Wijaya Kusuma, MA, Ph.D
NIP. 196202141986031001

Dibuat di : Pontianak
Pada Tanggal : 2 September 2013


(KHATIZAH)